

## BAB IV

### NILAI PERJUANGAN M. NATSIR DALAM PARTAI MASYUMI

#### A. Terhadap Revolusi (negeri)

Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya, semenjak menjadi anggota Masyumi M. Natsir sudah melibatkan diri dalam arena percaturan politik nasional. Kebangkitan M. Natsir sebagai tokoh penting dimulai dari jabatannya sebagai Menteri Penerangan selama tiga kali periode kabinet berturut-turut (kecauali masa kabinet Amir I dan II).

Melihat jabatan M. Natsir sebagai Mantri Penerangan pada masa revolusi bukannya tidak mempunyai arti penting dalam pemerintahan; sebagai Metri Penerangan M. Natsir seringa menjadi penasehat dalam menghadapi perundingan dengan pihak Belanda. Demikian pula sebagai Menteri Penerangan M. Natsir juga memberikan saham besar dalam membangkitkan semangat perjuangan.<sup>1</sup> Hal itu merupakan saham besar yang diberikan M. Natsir dalam masa revolusi.

Perjuangan politik M. Natsir yang banyak dilakukan dalam dan atas pemerintahan di atas tentu tidak dapat dinilai sebagai keluar dari arah politik partai, karena, justru dengan perjuangan itu, secara langsung M. Natsir telah berusaha mengimplikasikan cita-cita partai Masyumi<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Deliar Noer, Op. Cit, hlm. 426 dan 186.

Dilihat dari lamanya M. Natsir menjadi Menteri Penerangan selama tiga kali berturut-turut (kecuali masa kabinet Amir I dan II) sebagai tersebut di atas, berarti ia sudah mendapat kepercayaan dari kalangan pemerintah. Dan keterlibatan M. Natsir dalam pemerintahan ini tentunya membuat orang menilai sangat positif kemampuan serta kecakapan politiknya dalam pemerintahan yang kesemuanya ini berpengaruh dalam lingkungan Masyumi.<sup>3</sup>

Dari dedikasi dan prestasi M. Natsir di atas, akhirnya pada tahun 1949 terpilih menjadi ketua Masyumi. Untuk lebih memusatkan perhatiannya pada partai, M. Natsir sengaja meletakkan jabatannya dalam pemerintahan. Sikap M. Natsir ini didasarkan pada keputusan Kongres di Yogyakarta yaitu tentang larangan pemimpin Masyumi duduk dalam pemerintahan, yang bertujuan untuk membina organisasi.

Sebagai aktor politik yang mempunyai kejelian politik dalam mengantisipasi keadaan, M. Natsir cukup tanggap dengan keadaan negara yang kacau, M. Natsir tercatat sebagai "penyelamat" negara melalui "mosi integralnya". Ini merupakan salah satu keberuntungan bagi keluarga Masyumi dan umat Islam, yang memiliki pemimpin seperti M. Natsir yang telah menyelamatkan negara dari kehancuran. Di

---

<sup>2</sup>A.D. Masyumi 1945 yang menyebutkan cita-cita partai, yakni menegakkan kedaulatan R.I, ( Yusuf Abdullah Puar, Op. Cit. hlm. 166-167 ).

<sup>3</sup>Melalui jalur pemerintahan dan perwakilan rakyat ternyata dapat menaikkan gengsi serta kedudukan seseorang



jaksanaan kabinet Natsir terutama dalam keuangan, Natsir sangat hati-hati dalam pengalokasian dana, semuanya digunakan untuk pembangunan negara, tidak memberi kesempatan bagi para pemimpin maupun pendukung-pendukung pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Dari kebijaksanaan kabinet Natsir yang memberikan keuntungan terhadap Masyumi dan negara di atas di sisi lain juga membawa ke arah jatuhnya kabinet Natsir, Implikasi PP 39 yang memberikan keuntungan bagi Masyumi digunakan sebagai senjata oleh partai oposisi (PNI) untuk menjatuhkan kabinet Natsir; Karena konsistensinya M. Natsir dalam menolak kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat patronal, disamping pengalokasian dana yang ketat, juga menyebabkan kabinet Natsir kehilangan dukungan dari kebanyakan partai yang mendukungnya.

Salah satu ketegasan yang dapat dinilai dalam kabinet Natsir yang kemudian menyebabkan kabinetnya jatuh adalah sikap M. Natsir yang dinilai terlalu berani mengur campur tangan presiden terhadap kabinet Natsir tentang masalah Irian Barat. Sebagai akibat dari pernyataan M. Natsir secara terbuka yang ditanggapi presiden dengan perasaan tersinggung, dan perasaan ini semakin mendalam ketika persoalan ini dibawa dalam sidang kabinet

---

<sup>4</sup>Hasil keuntungan yang diperoleh selama kabinet Natsir, terutama dari keuntungan selama perang korea betul-betul dialokasikan untuk pembangunan ekonomi, tidak ada dan sama sekali untuk politik.

hasil penghitungan suara menunjukkan banyak yang mendukung Perdana Menteri Natsir dari pada presiden<sup>5</sup>. Inilah sebuah episode dari hubungan figur antara Soekarno dan M. Natsir, kemenangan untuk M. Natsir ternyata membawa ekor panjang bagi perjalanan politik Indonesia. Temperamen Soekarno sebagai figur paling puncak saat itu dapat menerima kekalahan suara seperti yang terjadi dalam sidang kabinet<sup>6</sup>, yang terjadi kemudian presiden secara tidak langsung menyokong parlemen untuk memperpendek umur kabinet Natsir.

Setelah kabinetnya jatuh, bukan berarti M. Natsir berhenti dari percaturan politik nasional, akan tetapi secara tidak langsung kebijaksanaan Natsir ikut menentukan, terutama dalam memberi kesempatan dan bantuan kepada kabinet Soekiman<sup>7</sup>. Padahal M. Natsir tidak setuju dengan cara pembentukan kabinet, ini didasarkan atas pertimbangan untuk menghindari perpecahan dalam Masyumi<sup>8</sup>, ketidaksetujuan M. Natsir dalam pembentukan kabinet Soekiman itu nampaknya cukup beralasan. Ini disebabkan adanya ketidakterbukaan Soekiman dalam pembentukan kabinetnya, yang menyebabkan pada saat terjadinya pengumuman

---

<sup>5</sup> Deliar, Op. Cit., hlm. 318.

<sup>6</sup> Dr. A. Syafi'i Ma'arif, Op. Cit., hlm. 77.

<sup>7</sup> Amanat, II, Op. Cit., hlm. 24

pembehtukan kabinet Soekiman, pimpinan pusat Masyumi masih membicarakan masalah itu.<sup>9</sup> Selain itu pengangkatan berdasarkan pendekatan pribadi terjadi atas duduknya Su barjo dalam kabinet utnuk mewakili Masyumi, padahal Su-barjo tidak pernah dikenal dalam Masyumi maupun organisasi Islam.

Jatuhnya kabinet Natsir ke tangan oposisi (PNI) bisa dikatakan oposisi yang dilakukan terhadap kabinet Natsir, seperti yang dikatakan Natsir, adalah tidak obyektif sama sekali, ini agaknya dapat dibenarkan, karena diketahui kemudian program kabinet Natsir yang semula mendapat kritik dari PNI (partai yang duduk dalam kabinet Soekiman) diambil alih adalah kabinet Soekiman.<sup>10</sup>

Dengan melihat kebijaksanaan politik M. Natsir dalam partainya dalam menjalankan kebijaksanaan Masyumi tentunya kebijaksanaan politik M. Natsir di atas cukup mendapat dukungan dan kepercayaan dalam Masyumi karena dalam Muktamar Masyumi ke VI memutuskan untuk mengangkat M. Natsir kembali menjadi ketua Masyumi.

---

<sup>8</sup> Deliar Noer, Op. Cit, hlm. 217.

<sup>9</sup> Soekiman tidak menghadiri sidang pimpinan partai, akhirnya rapat menunda sidang utnuk menentukan sikap terhadap kabinet, Ibid, hlm. 216.

<sup>10</sup> Capita Selecta II, Op. Cit, hlm. 217.

Ada peristiwa penting sehubungan dengan kebijaksanaan M. Natsir sebagai ketua Masyumi dalam partainya, terutama dengan peristiwa keluarnya NU dari Masyumi masa kabinet Wilopo. Sebagai yang sudah disebutkan dalam bab sebelumnya. Para cendekiawan banyak menampilkan berbagai visi alasan penyebab keluarnya NU dari Masyumi, untuk tidak terlalu jauh lagi, penulis membahas, penulis sebutkan uraian Deliar yang mengungkapkan masalah pokok dari peristiwa itu adalah berasal dari tidak terpenuhinya keinginan NU untuk menebut kursi kementrian agama. Lain halnya Boland<sup>nd</sup> menilai sebagai sikap NU yang oportunistis, namun bagi NU pemisahan itu sebagai cara terbaik untuk membebaskan jamaahnya dari rasa tidak puas, baik politik maupun religius dalam tubuh Masyumi. Bagaimanapun ramalan dari kenyataan harus diterima, bahwa jatah 8 kursi DPR pusat untuk NU, adalah amat kecil jika ternyata dalam PEMILU 1955 NU mendapat 25 kursi. Terlepas dari dua versi pendapat itu, kita juga perlu menengok peran pihak ketiga, dan bukannya peran pihak ketiga ini sama sekali tidak berarti. Agaknya peristiwa ini harus dilihat dari ketegasan M. Natsir dalam menentukan kebijaksanaan partainya. Tegas dalam memegang hasil putusan suara rapat. Anehnya ketegasan M. Natsir itu justru membawa konsekuensi NU keluar dari Masyumi. Dengan demikian perpecahan dalam Masyumi merupakan dikotomi persoalan di lu-

ar kemampuan M. Natsir untuk berbuat lebih banyak maka sudah sewajarnya kalau kabinet Wilopo kemudian dapat menerima keputusan Natsir ini.

Program M. Natsir dalam kalangan pemerintah, terutama dalam kabinet Wilopo, tidak dapat dipungkiri, pengaruh itu dapat dilihat dari kebijaksanaan kabinet Wilopo, baik kebijaksanaan dalam negeri, dalam menangani peristiwa tanjung Marowa, nasionalisasi tambang rakyat Sumatra Utara dan masalah kebijaksanaan ~~luar negeri~~ terutama penempatan kedutaan besar di Moskow.<sup>11</sup> Seberapa besar pengaruh itu dapat diketahui, ternyata kabinet Wilopo lebih dekat dengan Masyumi ketimbang partainya sendiri (PNI). Sebaliknya penyebab lain jatuhnya kabinet Wilopo-Prawoto karena Wilopo sendiri lebih sepakat dengan kelompok M. Natsir atau lebih setuju dengan pandangan Masyumi dari pada partainya (PNI), PNI yang telah mendapat dukungan PKI. Anehnya memang PKI dan PNI berusaha menjatuhkan kabinet yang didukung Masyumi melalui Sidik Kertapati.

Berbeda dengankondisi pada masa kabinet Ali I, yang lebih nampak dari kebijaksanaan politik M. Natsir adalah ketegasan dalam menghadapi pemerintah. Ketegasan itu terlihat dalam ~~menentukan~~ menentukan sikap partainya yakni tidak ikut sertanya Masyumi dalam kabinet disebabkan oleh peno

---

<sup>11</sup> Deliar Noer, Op. Cit., hlm. 226.

lakannya. Kebijaksanaan Natsir ini dapat dinilai tepat, karena kabinet yang baru terbentuk itu dalam menyusun programnya sudah menunjukkan tidak membawa keuntungan terhadap negara, akan tetapi lebih menguntungkan partai partai yang duduk dalam kabinet.

Perjuangan politik M. Natsir yang dinilai cukup menentukan sikap partainya dan menentukan kedudukan Masyumi pada masa kabinet Ali I, juga terlihat pada kebijaksanaan politiknya sebagai partai oposisi<sup>12</sup>. Oposisi Masyumi mendapat dukungan rakyat, karena Masyumi lebih membela kepentingan rakyat melalui berbagai counter M. Natsir (dalam parlemen) yang ditunjukan pemerintah untuk membuka kecurangan yang dilakukan kabinet, sebaliknya dengan kebijaksanaan politik M. Natsir dalam beroposisi membawa konsekwensi partai Masyumi dikucilkan dari pemerintahan.

Begitupun negatifnya penilaian Masyumi terhadap kabinet Ali I, Masyumi masih berusaha menyumbangkan pemikiran untuk mengatasi kesulitan yang ada. Langkah ini dibahas M. Natsir dalam kongres Masyumi di Surabaya.

Kesungguhan Masyumi dalam mengembalikan kewibawaan pemerintah dan memperbaiki keadaan di atas terlihat dalam kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi). Pada masa ini

---

<sup>12</sup> Kebijaksanaan politik M. Natsir dalam beroposisi didasarkan pada amar ma'ruf nahi munkar yang diujalakan ~~dida~~ penuh rasa tanggung jawab terhadap Allah, lihat Amanat, I, Op. Cit. hlm. 8.

kebijaksanaan politik M. Natsir cukup menentukan dan berpengaruh terhadap jalannya kabinet Burhanuddin, kenyataan ini membuktikan bahwa sebagian besar program kebijaksanaan politik kabinet Burhanuddin memakai program kebijaksanaan politik yang telah dirumuskan M. Natsir.<sup>13</sup> Sebagian konsekwensi dari kebijaksanaan politik M. Natsir secara tidak langsung, negara terbebas dari tindakan para koruptor, disamping itu pemerintah dapat mengembalikan kepercayaan negara lain terhadap Indonesia. Dengan demikian berarti sumbangan politik M. Natsir tersebut memberi dampak positif yang membawa keuntungan terhadap negara Indonesia dan rakyat Indonesia (dengan kebijaksanaan ekonominya).

### C. Menghadapi Komunis

Pada masa pembentukan kabinet Ali II, M. Natsir mengambil kebijaksanaan politik dengan menggalang partai partai Islam untuk mengucilkan PKI dari kabinet. Seruan M. Natsir ini dapat dinilai sebagai suatu kecermatan politiknya dalam menganalisa percaturan politik Indonesia. Kenyataan ini dapat dinilai dari prospek percaturan politik Indonesia yang semakin didominasi presiden dan PKI. Untuk membuktikan statemen ini perlu ditambahkan juga, bahwa seruan itu merupakan kebijaksanaan politik

---

<sup>13</sup>Lihat laporan kebijaksanaan politik pimpinan Masjumi dalam Amanat, I, Op. Cit, hlm. 52.

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 70.

yang didasarkan atas kekhawatiran M. Natsir sebagai ketua Masyumi terhadap kehendak presiden untuk memasukkan PKI dalam kabinet. Menurut M. Natsir dengan terlibatnya PKI dalam kabinet berarti telah menuju satu langkah awal ke arah perebutan diktator komunis internasional<sup>14</sup>. Sebagai konsekwensi dari kebijaksanaan politik M. Natsir di atas, Masyumi mengorbankan kursi dalam kabinet Ali II yang sedianya diperoleh Masyumi. Perjuangan politik M. N. Natsir, dalam Masyumi ini dapat dinilai sebagai penentu perjalanan pemerintah dalam menghindarkan bahaya dominasi PKI.

Lepas dari ancaman dominasi politik PKI, dalam kabinet, Masyumi berhadapan dengan dominasi politik presiden, dengan sistim demokrasi terpimpinnya.

Ketegasan M. Natsir dalam membawa kiprah politik Masyumi di atas dinilai jujur dan terlalu berani, karena membawa konsekwensi Masyumi atau bahkan M. Natsir sendiri disingkirkan Soekarno dan PKI dari arena percaturan politik Indonesia. Kalaupun M. Natsir sudah keluar dari Masyumi, akan tetapi pengaruh perjuangan politik M. Natsir masih nampak; hal itu terlihat pada penunjukan Pra woto sebagai ketua Masyumi, seorang yang lebih sejalan

---

<sup>14</sup> Amanat, I, hlm. 70.

dengan M. Natsir.

Dari berbagai uraian di atas dapat diketahui, bagaimana penting peran perjuangan politik M. Natsir terhadap partai politik Islam Masyumi, demikian pula pengaruh perjuangan politiknya atas Masyumi cukup kuat, sehingga M. Natsir selalu dipercaya untuk memegang kendali Masyumi. Sejuahmana perjuangan politik dan dedikasi M. Natsir dalam partai Masyumi Kahin menulis, " bertalian dengan peranan politik M. Natsir ..., teranglah bahwa salah satu dari sumbangannya yang paling berarti dapat dilihat dalam lamanya masa ia menjadi ketua umum dari partai politik Masyumi". Pengaruhnya terhadap kepemimpinan partai adalah selalu kuat, ia harus dibanggakan sebagai telah berbuat banyak dalam memajukan cita-cita progresif dalam penempatan haluan-haluan politik partai ".<sup>15</sup>

#### D. Dalam Idiologi Partai

Sebagai pemimpin Masyumi yang mempunyai pengaruh dan menentukan baik dalam Masyumi maupun pemerintahan M. Natsir juga konsekwen terhadap idiologinya. Dalam hal ini ada kaitannya dengan perjuangan M. Natsir yang duduk sebagai wakil Masyumi dalam sidang konstituante sudah menjadi kenyataan, M. Natsir yang dijuluki sebagai

---

<sup>15</sup>Yusuf Abdullah Puar, Op. Cit. hlm. 328.

tokoh pembaharu Islam, dalam memasuki partainya (Masyumi) untuk memperjuangkan Islam, yang dipandang M. Natsir sebagai ideologi<sup>16</sup>. Sebagai suatu bukti dari perjuangan itu M. Natsir dari sejak semula merumuskan konsep negara (berdasar) Islam dan memperjuangkannya dalam sidang konstituante di Bandung 1957. Perjuangan M. Natsir ini dapat dilihat juga sebagai usaha untuk merealisasikan cita-cita Masyumi. Hal ini sejalan dengan tujuan dan perjuangan Masyumi, melaksanakan ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara.<sup>17</sup>

Dengan perjuangan M. Natsir di atas berarti Masyumi sebagai partai politik yang berasaskan Islam, betul-betul berjuang untuk menegakkan terwujudnya negara yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam.

Sebagai suatu ilustrasi dari tekad perjuangan M. Natsir sebagai reformis Islam dalam Masyumi yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara Indonesia, perlu dikemukakan pendapat M. Natsir, bahwa orang Islam tidak akan berhenti dengan tercapainya kemerdekaan melainkan akan melanjutkan perjuangan selama negeri belum didasarkan dan diatur menurut susunan hukum kenegaraan Islam<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup>M. Natsir, Islam sebagai Ideologi, Op.Cit, h.7

<sup>17</sup>AD Masyumi 1952, ps. III dalam Perjuangan Masyumi, Op. Cit, hlm. 7

<sup>18</sup>Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1990-1942, LP3ES, Cet. II, Jakarta, 1982, hlm. 297.